

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 1998 merupakan momentum proses demokratisasi di Indonesia, Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada waktu itu membuat semua berubah. Jatuhnya rezim orde baru, telah membuka peluang bagi kehidupan politik bangsa Indonesia dan menumbuhkan hasrat para tokoh politik untuk dapat menggapai kekuasaan lewat partai politik. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik.

Pada masa reformasi tersebut, pembatasan yang selama puluhan tahun mereduksi aspirasi politik kedalam tiga partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tak mampu lagi dipertahankan. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Maka, kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Hanya dalam waktu satu tahun, sebanyak 181 partai politik hadir dan menyatakan diri siap mengikuti Pemilihan Umum 1999. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional (Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 2000: 21).

Dua pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis (tahun 1999 dan 2004) telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti pada Pemilu 2004 yang lalu, dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik yang berhasil

memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS, Demokrat dan Partai PAN adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif. Satu lagi perubahan besar dalam perpolitikan Indonesia adalah adanya sistem pemilu yang diadakan secara langsung karena calon pemimpin dapat dinilai langsung oleh rakyat sehingga menunjukkan adanya konsistensi penyelenggaraan pemerintah dalam mekanisme pemilihan pejabat publik, selain itu juga dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional. Dengan demikian rakyat memahami tujuan pemilihan secara langsung diselenggarakan.

Partai politik merupakan sarana yang penting sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang niscaya. Partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi dan partai politik akan tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan (Dwight Y King, Dalam Eman Hermawan dkk, 2004: 36)

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. partai politik pada dasarnya adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberi kepada anggota partainya manfaat secara idiil maupun materil (Carl J. Friedrich, Dalam Miriam Budiardjo 1993: 161).

Terkait dengan eksistensi partai politik, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan arah perjuangan partainya masing-masing. Perekrutan ini berkaitan erat dengan proses kaderisasi yang dilakukan oleh setiap partai politik dalam rangka mempertahankan eksistensi partai dalam pentas politik tanah air.

Kaderisasi merupakan upaya yang penting karena partai perlu membina kader mereka untuk menjadi anggota partai yang memiliki jiwa kepemimpinan dan bermental jujur. Untuk itu sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, hukum alamnya setiap manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik, ia membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus agar dapat menghasilkan kader-kader pemimpin masa depan yang berkualitas melalui partai politik yang mereka pimpin.

Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait saling membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Dibutuhkan kerja sama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan, misalnya seperti materi yang mampu membentuk pola berpikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan sebuah partai politik di Indonesia. Kelahiran Partai PAN dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA). Salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus [1998](#) berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Asas Partai PAN adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam". Ketua Umum saat ini yaitu Hatta Rajasa dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Amin Rais (id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional, diakses 23 Februari 2012).

Sebagai salah satu partai yang berkompetensi dalam dunia percaturan politik di Indonesia, PAN berupaya semaksimal mungkin mempertahankan eksistensinya. Salah satu upaya kongkrit yang dilakukan PAN adalah melaksanakan fungsi rekrutmen politik, dimana dengan fungsi ini mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif memperluas partisipasi politik. Caranya ialah dengan melakukan kontak pribadi persuasi dan lain-lain, juga usaha menarik masyarakat secara luas untuk dididik menjadi kader partai politik.

Pentingnya melakukan pembinaan kader adalah untuk mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi pada para kader PAN, permasalahan tersebut diantaranya yaitu kurangnya pemahaman dan kecakapan organisator para pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan dimana dengan tidak maksimalnya pemahaman dan kecakapan ini akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas organisasi yang juga akan berpengaruh pada kinerja PAN secara umum, permasalahan lain yaitu terpilihnya Abdurachman Sarbini sebagai ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Lampung dianggap inprosedural karena hanya lewat proses musyawarah . Salah satu kandidat, Fikri Yasin menggugat hasil Musyawarah Wilayah ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan, bahwa Musyawarah Wilayah PAN III Lampung tidak sah, karena meloloskan kader Partai Demokrat Abdurrachman Sarbini sebagai ketua DPW PAN Lampung dinilai menyalahi aturan partai. Menurut Fikri Yasrin, dalam putusan pengadilan disebutkan Abdurrachman Sarbini tak memenuhi syarat mencalonkan diri karena tidak pernah menjadi anggota dan menjabat pengurus PAN hanya memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Terpilihnya kader Partai Demokrat menjadi ketua DPW PAN Lampung diyakini akan melemahkan perjuangan kader PAN dan akan menimbulkan kecemburuan pada kader sejati Partai PAN Lampung (Sumber: hasil prariset pada DPD PAN Kota Bandar Lampung, 15 maret 2012)

Mengingat pentingnya kaderisasi sebagai upaya pembelajaran/ pendidikan politik yang sistematis, terarah dan kontinyu dengan berbagai tujuan sebagaimana telah disebutkan maka diperlukan proses kaderisasi yang sistematis untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi pada kader PAN sehingga dapat melaksanakan tugas dan kinerja organisasi secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan mengenai proses kaderisasi partai politik pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Proses Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu sosial dan politik, khususnya yang berkaitan dengan proses rekrutmen kader yang berkualitas bagi partai politik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pemikiran dan gagasan bagi partai politik dalam rangka menerapkan proses kaderisasi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai proses kaderisasi partai politik pada masa-masa yang akan datang.